



**SUMBANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN
BERSAMA MASYARAKAT TERHADAP PENDAPATAN
PENDUDUK DESA HUTAN DI RESORT POLISI
HUTAN TENGGER KESATUAN PEMANGKUAN
HUTAN KEBONHARJO KABUPATEN REMBANG**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Geografi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh:

**HENY SRI WAHYUNI SETIYONINGRUM
NIM 321400007**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI
2005**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Januari 2005

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. R. Sugiyanto, SU
NIP. 130515745

Dra. Eva Banowati, M.Si
NIP. 131813652

Mengetahui,
Ketua Jurusan Geografi

Drs. Sunarko, M.Pd
NIP. 130812916

PERSETUJUAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Februari 2005

Penguji Skripsi

Drs.Juhadi, M.Si

NIP.131568881

Anggota I

Drs.R.Sugiyanto, SU

NIP.130515745

Anggota II

Dra.Eva Banowati, M.Si

NIP.131813652

Mengetahui:

Dekan,

Drs. Sunardi

NIP.130367998

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Skripsi ini bukan plagiat dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan dari orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip sesuai dengan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2005

Heny Sri Wahyuni S
NIM. 3214000007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Perhatikan masa lalu dan masa depanmu. Hidup adalah ujian yang datang silih berganti, hendaknya kita mampu keluar dari ujian itu.” (al-Qarni)

“Jangan pernah menjadikan kesusahan dan kesedihan sebagai tema pembicaraan, karena dengan demikian akan menjadikan sebagai penghalang antara kebahagiaan.” (al-Qarni)

“Kemarin adalah mimpi yang telah berlalu, esok hari adalah cita-cita yang indah, dan hari ini adalah kenyataan maka hadapilah kenyataan hidup ini..”

“Kepercayaanmu terhadap dirimu akan sangat membantu mewujudkan makna hidup yang lebih baik.” (al-Qarni)

Untuk Ayah dan Ibu tercinta

Adikku tersayang “FIAN”

Seseorang yang akan menjadi teman hidupku

Teman-teman GEO”2000”

Sahabat yang slalu mendukungku

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sumbangan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat terhadap Pendapatan Penduduk Desa Hutan di Resort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang.”

Terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. DR. Ari Tri Sugito, SH, MM, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan belajar dan menimba ilmu di kampus ini.
2. Drs. Sunardi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Sunarko, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bantuan dalam proses pengurusan izin penelitian.
4. Drs.R.Sugiyanto, SU, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dra.Eva Banowati, M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Administratur Perum Perhutani KPH Kebonharjo yang telah memberikan ijin dalam melakukan penelitian.
7. Ketua dan anggota LMDH Jati Santosa yang telah meluangkan waktu dan memberi kesempatan pada penulis untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semau pihak yang telah membantu terselesainya penulisan skripsi ini.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca semua demi kesempurnaan penelitian yang akan datang.

Semarang, Februari 2005

Penulis,
Heny Sri Wahyuni.S

SARI

Heny Sri Wahyuni Setiyoningrum. 2005. *Sumbangan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Terhadap Pendapatan Penduduk Desa Hutan di Resort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang.* Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 82 h.

KATA KUNCI : PHBM, KPH, Pendapatan

Hutan merupakan aset negara yang harus diperhatikan keberadaannya, kuantitas dan kualitas sumberdaya hutan di Indonesia berubah sangat cepat dan terus memburuk dari tahun ke tahun, Ini disebabkan oleh praktik penebangan tanpa izin (*Illegal Logging*), perambahan, peladang berpindah, kebakaran hutan. Untuk mengatasi kondisi tersebut Pehutani meluncurkan program pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan PHBM.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) seberapa besar sumbangan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat terhadap pendapatan penduduk desa hutan di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang?, (2) seberapa besar partisipasi penduduk desa hutan dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang?. Penelitian ini bertujuan : (1) ingin mengetahui pendapatan penduduk yang mengikuti kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang, (2) ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di RPH Tengger KPH Kebonharjo?. Penelitian ini bermanfaat : (1) memberikan gambaran tentang usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam memanfaatkan lahan hutan, (2) sebagai bahan informasi kepada para perencana pengambil keputusan dan pihak yang terkait dalam mengatasi masalah pelestarian lingkungan hidup khususnya hutan, dan (3) sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

Populasi penelitian ini adalah semua penduduk desa hutan yang mengikuti kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang berjumlah 80 orang, karena jumlah populasi kurang dari 100 orang maka digunakan penelitian populasi. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode Observasi, metode Interview, metode Dokumentasi, metode Kuesioner. Ada dua variabel yaitu variabel Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat atau PHBM dan variabel

tentang pendapatan penduduk desa hutan. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Persentase (DP).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tengger merupakan daerah pedesaan dengan sebagian besar wilayahnya digunakan untuk area pertanian dan hutan. Dengan demikian adanya program PHBM dapat meningkatkan pendapatan penduduk desa hutan di RPH Tengger serta dapat mengurangi tingkat kerusakan hutan dengan menurunnya pencurian kayu hutan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program PHBM di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar hutan yang ditunjukkan meningkatnya pendapatan dari kurang Rp. 10.000,00 menjadi Rp. 10.000,00 sampai Rp.15.000,00 perhari kegiatan. Serta menurunnya kerusakan hutan. Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pihak Perhutani dapat memperluas area PHBM dan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Skripsi.....	9
BAB II LANDASAN TEORI PENELITIAN DAN HIPOTESIS	
A. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.....	10
B. Pengelolaan Hutan	13
C. Pendapatan Masyarakat.....	17
D. Konsep Partisipasi.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel	22
B. Variabel Penelitian	22
C. Metode Pengumpulan Data	23
D. Metode Analisa Data.....	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	26
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	26
2. Kondisi Sosial Ekonomi	29
3. Pelaksanaan Program PHBM.....	38
4. Sumbangan PHBM terhadap Pendapatan Penduduk	55
5. Sumbangan PHBM terhadap Penurunan Kerusakan Hutan	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	63
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	28
2. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Tengger.....	28
3. Distribusi Umur Responden Penelitian.....	30
4. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden Penelitian.....	30
5. Mata Pencaharian Pokok Responden	31
6. Mata Pencaharian Sambilan Responden	32
7. Luas Lahan Sawah yang Dimiliki Responden	32
8. Luas Lahan Tegalan yang Dimiliki Responden	33
9. Status Lahan Sawah yang Dimiliki Responden	33
10. Status Lahan Tegalan yang Dimiliki Responden.....	34
11. Lama Menggarap Lahan Garapan Lahan Garapan dari Program PHBM....	34
12. Alasan Bersedia Menggarap Lahan Program PHBM	35
13. Pendapatan Bersih Petani Sebelum Mengikuti Program PHBM	36
14. Pendapatan Bersih Petani Setelah Mengikuti Program PHBM	37
15. Pengenalan Program PHBM	38
16. Pengenalan Program PHBM oleh Perhutani	39
17. Lokasi Pengenalan Program PHBM oleh Perhutani	40
18. Persiapan Lapangan pada Penanaman Tanaman PHBM	41
19. Pola Tanaman dalam Program PHBM.....	41
20. Luas Area PHBM yang Ditanami Penggarap	42
21. Kegiatan Penyulaman Tanaman yang Mati	43
22. Cara Penyulaman Tanaman.....	43
23. Perolehan Pupuk oleh Petani untuk Tanaman PHBM	44
24. Jenis Pupuk untuk Tanaman PHBM	45
25. Pengamanan Hutan	45
26. Penyebab Menurunnya Pencurian Kayu Hutan Setelah Adanya PHBM....	46
27. Pemanenan Tanaman Tumpang Sari.....	47
28. Besarnya Hasil Pemanenan Setiap Musim.....	48

29. Partisipasi Pemanenan dalam Program PHBM.....	48
30. Pendapatan pada Masa Penebangan.....	49
31. Sistem Pemberian Upah.....	50
32. Area Pengembangan Hutan Rakyat.....	50
33. Cara Pengembangan Hutan Rakyat.....	51
34. Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari.....	52
35. Sikap Responden dengan Didirikannya Koperasi.....	52
36. Permodalan Koperasi.....	53
37. Syarat-syarat Menjadi Anggota Koperasi.....	54
38. Pemenuhan Kebutuhan Petani Melalui Koperasi.....	54
39. Tingkat Pencurian Kayu di Lahan PHBM.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Administrasi Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang ...	64
2. Peta Penggunaan Lahan Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang	65
3. Tabulasi Hasil Penelitian	66
4. Hasil Penelitian dengan Analisis Deskriptif Persentase.....	69
5. Surat Permohonan Ijin Penelitian untuk Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Rembang	76
6. Surat Permohonan Ijin Penelitian untuk Administratur Perum Perhutani KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang	77
7. Surat Rekomendasi Penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Rembang	78
8. Surat Ijin Penelitian dari Perhutani KPH Kebonharjo	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pengenalan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).....	81
2. Persiapan Lapangan Berupa Pengelolaan Tanah	81
3. Persiapan Bibit Tanaman di Persemaian.....	81
4. Tanaman yang di Tanam dalam PHBM (Jati, Mahoni, Secang)	81
5. Tanaman Jati yang di Pelihara dalam Program PHBM	81
6. Persiapan Pupuk Kandang yang Diperoleh dari Perhutani	81
7. Petugas Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang sedang Melakukan Penjagaan Hutan	82
8. Sisa Pohon Jati yang Dicuri	82
9. Hutan Jati yang Sedang Meranggas di Musim Kemarau	82
10. Acara Penyerahan Bagi Hasil Hutan Kayu	82
11. Hutan Rakyat di Lahan Penduduk	82
12. Administratur Perum Perhutani KPH Kebonharjo Mendampingi Tamu dari Luar Negeri yang Sedang Melakukan Peninjauan Hutan Rakyat.....	82

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengusahaan hutan merupakan salah satu komponen dalam pembangunan kehutanan. Pembangunan kehutanan dalam GBHN 1999-2004 diarahkan untuk mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang (GBHN:1999-2004).

Pengusahaan hutan diatur melalui pola kemitraan yang membantu penerimaan devisa sebesar-besarnya bagi negara dan diselaraskan dengan kepentingan rakyat yang tinggal dan hidup di wilayah hutan. Pengusahaan hutan harus mencegah terjadinya kerusakan hutan dan pengaturan pendayagunaan serta perlindungan hutan perlu ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan produksi hasil hutan dan pemanfaatannya perlu disertai usaha penertiban dan pengamanan hutan serta penanaman kembali (Sudiono,1995).

Dalam pembangunan hutan di samping usaha-usaha peningkatan kelestarian hutan, juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan serta pelestarian hutan. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan berarti pengentasan kemiskinan (Sudiono, 1995).

Masalah pelestarian hutan dan khususnya pengelolaan sumberdaya alam atau hutan oleh masyarakat lokal pada dasawarsa terakhir ini banyak di bicarakan oleh berbagai kalangan. Hal tersebut disebabkan oleh kurang berhasilnya upaya pemerintah dalam mengelola sumberdaya hutan pada masa lalu. Pada masa itu pemerintah atau badan-badan pembangunan dalam menetapkan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan kurang memberi perhatian terhadap pola-pola pengelolaan secara tradisional yang lazim di praktekkan oleh masyarakat setempat. Salah satu alasan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pola-pola pengelolaan sumberdaya alam atau hutan secara tradisional adalah adanya anggapan bahwa pola-pola tersebut bersifat boros dan tidak efisien, khususnya di daerah tropis.

Di Pulau Jawa degradasi potensi hutan dan kualitas sumberdaya hutan akibat pengelolaan yang sentralistis ternyata tidak menjamin prinsip-prinsip kelestarian hutan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan departemen kehutanan ini tidak berdaya menghadapi penjarahan dan pencurian kayu di hutan-hutan Pulau Jawa yang marak seiring dengan bergulirnya reformasi. Ini merupakan buah dari manajemen pengelolaan hutan selama ini yang tidak melibatkan secara penuh masyarakat di sekitar hutan. Ini jelas, produk dari sebuah sistem pengelolaan hutan yang bersifat sentralistis dan arogan (Muhtadi, 2002).

Pengelola merasa bahwa masyarakat yang sebenarnya harus dilibatkan dalam pelestarian hutan, tidak berhak serta mengelola hutan. Hutan adalah milik negara yang harus di awasi dengan pendekatan keamanan. Selama

sepuluh tahun sistem itu berjalan, muncul kecemburuan sosial yang amat tajam dari masyarakat, tidak saja mereka yang tinggal di sekitar hutan, tetapi pihak-pihak yang merasa bahwa sistem pengelolaan hutan itu tidak adil (Muhtadi, 2002).

Kecemburuan itu makin membumbung tinggi dan akhirnya meledak pada era reformasi. Memburuknya kondisi hutan antara lain juga tidak diimbangi dengan kemampuan membuat hutan tanaman yang baik dan memadai sesuai kebutuhan pasar industri. Sejak tahun 1985-an, secara nasional pembangunan hutan tanaman industri (HTI) sampai saat ini hanya sekitar 2 juta hektar dari target 6,2 juta hektar pada satu pelita saja. Kuantitas dan kualitas sumberdaya hutan Indonesia terutama hutan alam di luar Pulau Jawa, berubah sangat cepat dan terus memburuk dari tahun ke tahun (Muhtadi, 2002).

Penyebab utamanya adalah praktik penebangan tanpa izin (*illegal logging*), di samping karena perambahan (*forest encroachment*), peladangan berpindah (*shifting cultivation*), kebakaran hutan (*forest fires*), serta sebab-sebab lainnya. Degradasi hutan juga dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat dalam penetapan sistem rente ekonomi kayu bulat atau pungutan-pungutan hasil kayu yang nilainya tidak sebanding dengan nilai hutan atau kayu yang ditebang, menyebabkan terjadinya penebangan yang berlebihan (*over cutting*). Praktik penebangan liar telah pula memacu terjadinya degradasi moral bangsa atau aparat dan masyarakat umum (Muhtadi, 2002).

Dalam kaitan ini perlu ada perubahan paradigma bahwa memperkuat masyarakat adalah (*social investment*), dan bukan beban sosial (*social cost*). Tindakan investasi sosial dalam banyak kasus di bidang kehutanan terbukti mampu mendukung keberlanjutan sistem pengelolaan sumberdaya dan investasi yang ada. Menyadari kekeliruan dalam pengelolaan hutan itu perhutani berupaya meluncurkan program pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan PHBM. Masyarakat berperan dalam pengelolaan hutan sehingga mereka mendapat bagian baik dari hasil kayu maupun dari hasil non kayu (Muhtadi, 2002).

Pembangunan sektor kehutanan yang di lakukan perum perhutani Unit I Jawa tengah di tahun-tahun mendatang khususnya tahun 2004 akan lebih banyak menghadapi tantangan, baik interen misalnya peningkatan hasil produksi hutan maupun ekstern misalnya pencurian kayu hutan. Akibat aksi penjarahan hutan yang menyebabkan tanah kosong, oleh karena itu perhutani harus mampu mereboisasi dan merehabilitasi kembali (Hanafi, 2004).

Pencurian kayu berdampak terhadap berkurangnya aset terbangun, misalnya di RPH Tengger KPH Kebonharjo pada tahun 2000 terjadi kerusakan hutan berupa pencurian penjarahan 573 pohon dengan kerugian Rp 95.538.631. Sehingga mempengaruhi pendapatan perusahaan, dilakukannya penghematan, dalam hal penyempitan jabatan misalnya karyawan yang tidak produktif dipensiunkan lebih cepat dan tidak menutup kemungkinan restrukturisasi alami dengan tidak menambah pegawai baru. Sebelum penjarahan hutan, kelangsungan hidup perhutani 80% di topang terbangun

kayu jati. Sedangkan kini tinggal 60%. Bahwa nilai ekspor kayu sampai akhir 2003, perbandingannya malah sama dengan non kayu yakni (*fifty-fifty*) (Hanafi, 2004).

Tentang gangguan dan kerawanan hutan, perhutani telah melakukan berbagai upaya dalam menanganinya. Namun sampai saat ini dapat dikatakan belum optimal. Hal ini tidak lepas dari anggapan bahwa pengamanan hutan semata-mata hanya menjadi tanggung jawab perhutani sendiri. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dipandang perlu adanya peran serta dari berbagai pihak terkait dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat. Mengingat, hutan selain aset negara yang bernilai tinggi, juga memiliki fungsi ekologis dan sosial. Masalah hutan menjadi tanggung jawab semua pihak (Hanafi, 2004).

Meskipun sering terjadi penjarahan kayu hutan tetapi pihak perhutani masih memiliki aset hutan jati yang masih bisa diandalkan untuk menghidupi perusahaan dan kelestarian hutan. Agar sumberdaya hutan itu tidak dicuri, perhutani melakukan pengembangan Desa Model PHBM dengan membentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dengan program bagi hasil tebangan kayu dan getah (Hanafi, 2004).

Bertitik tolak pada kondisi di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan memilih judul tentang “Sumbangan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat terhadap Pendapatan Penduduk Desa Hutan di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang” dengan memenuhi syarat-syarat penulisan ilmiah serta obyektif.

B. Penegasan Istilah

Pada suatu penelitian penafsiran yang benar merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi, karena penafsiran yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Untuk itu perlu adanya penegasan istilah yang jelas dari judul penelitian di atas.

Menurut buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah tahun 2001 batasan-batasan istilah yang di maksud adalah seperti berikut :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan reboisasi berisi sumberdaya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan.
2. Sumberdaya Hutan adalah benda hayati, non hayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya.
3. Pengelolaan Sumberdaya Hutan adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan suatu rencana yang matang dan lengkap, dimanfaatkan secara arif dan bijaksana, perkembangan pemanfaatannya selalu dipantau dan di evaluasi, agar lebih diperoleh manfaat yang lestari dan optimal baik manfaat lingkungan, manfaat ekonomi ,maupun manfaat sosial.
4. Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.

5. Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam penelitian ini adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang di lakukan bersama dengan jiwa berbagi antara Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

6. Pendapatan adalah hasil yang diterima dan diberikan kepada subyek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasinya yang diserahkan yang berupa hasil dari pekerjaan dan hasil dari prestasi yang dilakukan sendiri.
7. Partisipasi adalah keterlibatan sejumlah orang dalam situasi-situasi atau tindakan-tindakan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial (Conen dalam Astuti, 2000).

C. Permasalahan

Dari uraian di atas telah dikemukakan bahwa Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Dari hal tersebut penulis ingin mengkaji :

- a. Seberapa besar Sumbangan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat terhadap Pendapatan Penduduk Desa Hutan di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang ?
- b. Seberapa besar partisipasi masyarakat desa hutan dalam kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pendapatan penduduk yang mengikuti kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang.
- b. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran tentang usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH dalam memanfaatkan lahan hutan.
2. Sebagai bahan informasi kepada para perencana pengambil keputusan dan pihak-pihak terkait dalam upaya mengatasi masalah pelestarian lingkungan hidup khususnya hutan.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini di bagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi.

I. Bagian pendahuluan skripsi

Bagian ini terdiri dari judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan daftar gambar.

II. Bagian isi skripsi.

Bagian isi skripsi dari lima bab yang disusun menurut sistematika sebagai berikut : Bab satu pendahuluan, berisi latar belakang, penegasan istilah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. Bab dua landasan teori, berisikan tinjauan pustaka. Landasan teori dalam penelitian ini meliputi berbagai teori pendukung yaitu teori pendapatan, kehutanan, partisipasi. Bab tiga metode penelitian, yang berisikan tentang populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode dan alat pengumpulan data serta metode analisa data. Bab empat hasil penelitian dan pembahasan, berisikan deskripsi situasi dan kondisi daerah penelitian, penyajian data, hasil analisa data dan pembahasannya. Bab lima kesimpulan dan saran yang di harapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait dan masyarakat setempat.

III. Bagian akhir skripsi ini berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Studi dan analisa geografi meliputi analisa gejala manusia dengan gejala alam dan meliputi pula analisa penyebarannya akibat interelasi dan interaksinya dalam ruang. Melihat analisa gejala yang di pelajari, geografi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan “*What, where, why, when dan how*” (Sumaatmadja dalam Alsiah, 2004).

Menurut buku petunjuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Unit I Jawa Tengah tahun 2002. Salah satu kegiatan implementasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diwujudkan melalui desa model PHBM. Satuan terkecil PHBM adalah desa dengan petak-petak hutan pangkuan. Untuk jangka pendek ini di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, khususnya di KPH Kebonharjo di setiap Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), minimal dibangun satu buah desa model sebagai pembelajaran desa lain, sehingga untuk jangka panjang diharapkan akan muncul semakin banyak desa model yang lain dan akhirnya diharapkan terbangun pengelolaan hutan dengan sistem PHBM dengan satuan kawasan Sub DAS (Daerah Aliran Sungai).

A. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat [PHBM]

1. Pengertian Program PHBM

Hutan merupakan faktor dominan dalam mendukung lingkungan yang berkualitas, karena perlu ditingkatkan pengelolaannya agar

kerusakan dapat di cegah. Kerusakan hutan dapat di lihat pada beberapa kawasan kurang bermanfaat berupa tanah gundul. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang selanjutnya di singkat PHBM menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang di lakukan bersama dengan jiwa berbagi antara Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Jadi program PHBM merupakan suatu proyek perhutani yang dipandang dapat menyelamatkan hutan. Program PHBM adalah pengelolaan sumberdaya hutan dengan cara berbagi, yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan waktu, ruang dan lahan, dan hasil dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung.

2. Maksud dan Tujuan dari Program PHBM:

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proposional. Pada dasarnya program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.

- b. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
- c. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan, produktifitas dan keamanan hutan.
- d. Mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan sesuai kondisi dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- e. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.

Dari kelima tujuan yang ingin dicapai dalam program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat tersebut, faktor penduduk sekitar hutan sangat diperhatikan. Hal ini di sadari karena hutan dipandang sebagai suatu ekosistem dengan lingkungannya. Hutan merupakan aset nasional yang harus dimanfaatkan secara efektif dan efesien, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungannya. Hilangnya keserasian antara hutan dengan lingkungannya akan menimbulkan kesenjangan, salah satu elemen ekosistem yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan.

3. Manfaat program PHBM

Manfaat program PHBM adalah :

a. Manfaat ekologi

Pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah akan bermanfaat bagi keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan itu sendiri.

b. Manfaat ekonomi

Melalui pemanfaatan berbagi yang jelas akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa hutan melalui pembagian hasil hutan.

c. Manfaat sosial

Memberikan manfaat sosial khususnya dalam menciptakan lapangan kerja serta peningkatan teknologi bagi masyarakat.

B. Pengelolaan Hutan

Hutan sangat penting bagi kehidupan dimuka bumi, terutama bagi kehidupan generasi mendatang. Kesalahan dalam pengelolaan hutan berarti menyiksa kehidupan generasi mendatang. Untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan hutan maka fungsi hutan harus dipelajari dan dimengerti secara utuh (Arifin dalam Isrowikah, 2003).

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan disebutkan bahwa berdasarkan fungsinya hutan (negara) dibedakan menjadi :

1. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukan guna pengaturan tata air , pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
2. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang diperuntukan untuk produksi hasil hutan dalam rangka memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor.
3. Hutan suaka alam, yaitu kawasan hutan karena sifatnya yang khas diperuntukan secara khusus untuk perlindungan alam hayati.

Pengelolaan hutan berarti pemanfaatan fungsi hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara maksimal. Pada waktu manusia belum mengenal hubungan komersial secara luas, hutan dimanfaatkan sebagai tempat mengambil bahan makanan nabati maupun hewani atau tempat mengambil kayu untuk membuat rumah tempat tinggal dan sumber energi. Hutan juga sering ditebang untuk memperluas tempat pemukiman, lahan pertanian, atau mengamankan wilayah dari gangguan binatang buas (Simon dalam Isrowikah, 2003).

Arifin (dalam Isrowikah, 2003) menyebutkan bahwa dalam pembangunan kehutanan memerlukan suatu kebijakan, yaitu suatu pengelolaan yang dikaitkan dengan hukum atau perundang-undangan yang tidak terlepas dari sudut ilmu-ilmu lainnya. Kebijakan pengelolaan hutan tersebut dapat dilakukan dengan:

1. Pemanfaatan kawasan hutan tetap.
2. Peningkatan mutu dan produktifitas kawasan hutan negara dan hutan rakyat agar penghasilan negara dan rakyat meningkat.
3. Peningkatan efisiensi dan produktifitas pengelolaan hasil hutan
4. Peningkatan peran serta masyarakat.
5. Penanggulangan kemiskinan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan.
6. Pelestarian hutan sebagai pelindung lingkungan dan ekosistem.
7. Peningkatan pengawasan pembangunan kehutanan.

Pengelolaan hutan merupakan teknik pengusahaan hutan dan prinsip-prinsip untuk mengoperasikan fungsi hutan. Menurut Arifin (dalam Isrowikah, 2003) tujuan dari pengelolaan hutan adalah untuk memperoleh keuntungan dan nilai yang sebesar-besarnya dari manfaat hutan. Pengelolaan hutan mencakup kegiatan yang terdiri dari:

1. Strategi pengelolaan

Strategi pengelolaan adalah suatu kerangka umum pengelolaan hutan pada tingkat wilayah yang meliputi kegiatan memanfaatkan hutan dan pengelolaan hasil hutan. Strategi pengelolaan memegang peranan penting karena tanpa strategi yang tepat pengelolaan hutan tidak akan berhasil dengan baik.

2. Sistem pengelolaan

Sistem pengelolaan merupakan suatu ilmu pengetahuan hutan pada tingkat perencanaan yang meliputi pemilihan jenis tanaman, penentuan daur atau rotasi tanaman, dan petunjuk pelaksanaan di lapangan.

3. Manajemen pengelolaan

Manajemen pengelolaan adalah pengelolaan hutan pada suatu tegakan yang dilaksanakan oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dengan mempertimbangkan keadaan atau kondisi wilayah baik yang terkait dengan kondisi fisik maupun sosial ekonomi wilayah yang bersangkutan.

Pada dasarnya tujuan pengelolaan hutan harus mengacu pada bagaimana perumusannya untuk memaksimalkan manfaat yang disediakan

oleh hutan. Begitu juga aplikasinya harus tidak menyimpang dari rencana yang selalu berpegang pada prinsip-prinsip agro-ekosistem, produktivitas, stabilitas, kelestarian dan keadilan. Oleh karena itu landasan penelitian bertitik tolak pada semua fungsi hutan, bagaimana tujuan pengelolaan hutan dirumuskan, serta seperti apa rencana dilaksanakan (Simon dalam Isrowikah, 2003).

Masalah pengelolaan hutan tidak terlepas dari pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain :

a. Lapangan kerja tersedia

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sangat mempengaruhi proses pengelolaan hutan, dan bila lapangan pekerjaan yang tersedia di masyarakat tersebut dapat menghambat pengelolaan hutan, sehingga di dalam pengelolaan hutan perlu menampung masyarakat agar dapat dilibatkan secara optimal.

b. Defisit kayu bakar dan kayu pertukangan

Apabila masyarakat di sekitar hutan menggunakan kayu atau renek sebagai bahan bakar, banyak terdapat pengrajin kayu atau pertukangan maka hal ini dapat menghambat proses pengelolaan hutan. Perlu diperhatikan pula laju pemakaian kayu untuk kebutuhan tersebut hingga perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan dalam mengeksploitasi hasil hutan (Departemen Kehutanan, 1996).

c. Defisit bahan pangan dan ternak

Apabila ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat di sekitar hutan terbatas, yang disebabkan oleh beberapa faktor alam, antara lain keterbatasan pemilikan lahan, maka akan berpengaruh pada cara hidup mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan hutan, sehingga pengelolaan hutan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di sekitar hutan.

d. Kemungkinan untuk konservasi

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk konservasi perlu memperhatikan tanah, air, topografi, maupun pertukaran oksigen dan karbondioksida secara tepat sehingga pengelolaan hutan tidak berdampak negatif pada sisi lain. Selain itu pengelolaan hutan bisa dikembangkan untuk suaka alam atau obyek wisata (Simon dalam Isrowikah, 2003).

Pengelolaan hutan harus ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan agar fungsi tanah, air, udara, dan iklim mampu memberikan manfaat bagi masyarakat (Arifin dalam Isrowikah, 2003).

C. Pendapatan Masyarakat

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah hasil yang diterima dan diberikan kepada subyek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yang berupa hasil dari pekerjaan dan hasil dari prestasi yang dilakukan sendiri (Mubyarto, 1973).

2. Jenis-jenis Pendapatan

Pendapatan dalam masyarakat di kategorikan menjadi tiga golongan yaitu

a. Pendapatan Pokok

Diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari upah sebagai kerja pokok.

b. Pendapatan Tambahan

Yaitu pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan pokok.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan pokok dan pendapatan sambilan.

3. Sumber-sumber Pendapatan.

Pendapatan masyarakat pada umumnya tidak hanya berasal dari satu sumber saja, melainkan dari beberapa sumber. Adapun sumber-sumber pendapatan masyarakat itu dapat di kelompokkan menjadi :

a. Penghasilan dari pendapatan. Penghasilan diperoleh dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti penghasilan dari praktek dokter.

b. Penghasilan dari kegiatan usaha melalui sarana perusahaan.

c. Penghasilan dari modal. Yaitu penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya sendiri, misal penghasilan diperoleh dari pengerjaan tanah.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan:

- a. Kesempatan kerja yang tersedia. Semakin banyaknya kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak pendapatan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- b. Kecakapan dan keahlian. Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula pada pendapatan.
- c. Keuletan bekerja. Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan bila suatu saat menghadapi kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti kearah kesuksesan dan keberhasilan.
- d. Banyak sedikitnya modal yang dipergunakan. Banyak sedikitnya modal yang digunakan seseorang sangat mempengaruhi besar kecilnya modal yang digunakan. Suatu usaha yang besar akan memberi peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

Untuk memperkirakan pendapatan ada empat konsep yang digunakan, yaitu:

- a. Konsep produksi, perkiraan ini menitik beratkan pada hasil usaha yang dilakukan masyarakat berbentuk barang dan jasa.
- b. Konsep pendapatan, konsep ini dilakukan dengan merangkum pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
- c. Konsep pengeluaran, konsep ini mengkaji tentang pengeluaran masyarakat ataupun pemerintah secara agraris.

- d. Konsep alokasi, konsep ini digunakan apabila secara terperinci cara ketiga tersebut di atas tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, maka cara mendapatkannya dengan mengalokasikan bagian total produk sehingga diperoleh produksi dari sektor yang diperlukan atau di peroleh atau di amati (Kasryno, 1984).

Dengan demikian pendapatan yang tinggi akan menyebabkan manusia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam status ekonomi di masyarakat. Jabatan atau pekerjaan yang baik berhubungan erat dengan kemampuan ekonomi (Saadah, 1990). Pendapatan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia akan benda atau jasa guna mempertahankan hidupnya.

Bagi manusia yang tingkat pendapatannya tinggi akan dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Bagi yang tingkat pendapatannya rendah mampu memenuhi kebutuhan yang berlangsung saat ini dan tidak ada persediaan untuk masa datang. Jadi tingkat pendapatan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari batasan tersebut di atas yang dimaksud pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat desa hutan selama mengikuti program PHBM.

D. Konsep Partisipasi

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris “Participation” yang dalam bahasa Indonesia berarti hal yang mengambil bagian ikut serta. Partisipasi dapat diberi makna seperti yang dikemukakan oleh Conen yaitu

sebagai keterlibatan sejumlah orang dalam situasi-situasi atau tindakan-tindakan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial.

Keith Devis (dalam Astuti, 2000) berpendapat bahwa partisipasi terdiri dari tiga hal yaitu :

1. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional.
2. Partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok.
3. Partisipasi merupakan tanggungjawab terhadap kelompok.

Sedangkan T.B Simatupang (dalam Astuti, 2000) memberikan rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi berarti menjalankan usaha bersama yang dijalankan dengan jalan bahu membahu untuk membangun masa depan.
2. Partisipasi berarti sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dan mempunyai dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa Indonesia.
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian pembangunan itu, nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.

Dengan demikian yang dimaksud partisipasi adalah sumbangan yang diberikan oleh masyarakat dalam program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini populasinya adalah semua masyarakat desa hutan yang mengikuti kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang. Dengan luas wilayah PHBM yaitu 341,8 Ha, serta kondisi hutan yang tingkat kerusakannya masih rendah. Dengan jumlah populasi sebanyak 80 orang yaitu penduduk yang berada di sekitar hutan.

2. Sampel

Dengan demikian dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil sebesar 80 orang karena populasinya kurang dari 100 (Arikunto, 1993)

B. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini di kemukakan beberapa variabel yaitu:

1. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) meliputi
 - a) Kegiatan Berbasis Lahan
 - 1) Penanaman
 - 2) Pemeliharaan
 - 3) Perlindungan
 - 4) Pemanenan hasil hutan

b) Berbasis Bukan Lahan

- 1) Pengenalan program PHBM
- 2) Pengembangan Hutan Rakyat
- 3) Upaya peningkatan kesejahteraan

2. Pendapatan Masyarakat Desa Hutan

Pendapatan Masyarakat yang dimaksud di sini adalah Pendapatan yang diperoleh masyarakat desa hutan selama mengikuti program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.

C. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Yang dimaksud dengan metode observasi yaitu pengamatan yang disertai dengan keterlibatan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana keadaan hutan dan mengamati gejala-gejala baik tindakan, peristiwa, dan perilaku masyarakat desa hutan dalam kaitannya dengan pelaksanaan program PHBM.

b. Metode Wawancara

Metode ini digunakan untuk menjangkau informasi mengenai satu gejala yang berkenaan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan di gunakan untuk memperoleh data mengenai Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, apabila data yang diperoleh dari angket dirasa masih kurang.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi, memahami dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari informan. Data yang diperoleh dari metode ini berupa data sekunder yang berhubungan dengan data demografi, data wilayah, data kehutanan, dan data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari kantor desa, kantor Perhutani, dan kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

d. Metode Angket

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada anggota masyarakat yang mengikuti program PHBM. Setiap responden akan mendapatkan pertanyaan tertulis

D. Metode Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif. Metode ini digunakan untuk memberikan deskriptif atau pembahasan yang masih berupa skor. Analisa deskriptif persentatif berdasarkan skoring untuk variabel yang diteliti. Soal-soal diberi bobot nilai atau skor sebagai berikut :

1. Untuk jawaban a diberi skor 5
2. Untuk jawaban b diberi skor 4
3. Untuk jawaban c diberi skor 3
4. Untuk jawaban d diberi skor 2
5. Untuk jawaban e diberi skor 1

Setelah data dikumpulkan kemudian skor setiap responden yang diteliti dijumlah dan selanjutnya dikelompokkan dalam bentuk persentase.

Adapun rumus yang digunakan untuk analisa data ini yaitu :

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

DP = Presentase nilai yang diperoleh

n = Skor yang diperoleh

N = Skor Maksimal

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang diperoleh masing-masing komponen dalam variabel, dari perhitungan deskriptif persentase kemudian ditafsirkan dalam kalimat.

Berdasarkan rumus di atas penelitian memberikan skor tertinggi 5 dan skor terendah 1 atas jawaban yang diberikan oleh responden. Soal-soal dalam instumen penelitian yang diberikan skor dan dihitung yaitu untuk mendeskripsikan penerapan program PHBM.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

a. Letak Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tengger yang terletak di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 926 Ha berupa daerah perbukitan dengan jenis tanah gromosol yaitu tanah sifatnya berubah-ubah, mengembang dan mengerut kadar liat yang tinggi yaitu lebih dari 30%. Pada saat musim kemarau atau kering, tanah ini akan dalam keadaan keras dan retak-retak sedangkan pada musim penghujan tanah gromosol akan lengket dan mengembang. Curah hujan 1.200 mm/tahun, banyaknya hari hujan 125 hari/tahun, tipe iklim C (semith dan ferguson), dan suhu udara 29⁰C. Letak Desa Tengger berada 111⁰49'54"BT-111⁰51'29" BT dan 06⁰31'12" LS - 06⁰34'26" LS (Sumber: Peta Rupabumi Lembar 1509-203 Tahun 2001). Desa Tengger mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Desa Sumberejo

Sebelah Selatan : Desa Tahunan

Sebelah Utara : Desa Karas (Kecamatan Sedan)

Sebelah Barat : Desa Bitingan

Orbitasi atau jarak Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten

Rembang dari pusat pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan	: 8 km
Jarak dari ibu kota Kabupaten	: 50 km
Jarak dari ibu kota Propinsi	: 160 km
Jarak dari ibu kota Negara	: 644 km

Lebih jelasnya letak geografis dari Desa Tengger dapat dilihat pada lampiran.

b. Potensi Wilayah

Secara umum Desa Tengger merupakan daerah pedesaan dengan sebagian besar wilayahnya digunakan untuk area pertanian berupa sawah dan tegalan 374,5 Ha dan hutan 528 Ha. Menurut jenisnya, pembagian tanah di Desa Tengger dapat dikategorikan menjadi dua yaitu 1) tanah basah, dan 2) tanah kering. Pada area tanah basah ini digunakan untuk area persawahan dengan jenis tanaman yaitu tanaman padi untuk musim penghujan dan tanaman polowijo untuk musim kemarau. Luas tanah basah di Desa Tengger kurang lebih 162,5 Ha sedangkan luas tanah kering yang digunakan untuk area pekarangan seluas 3 Ha dan tegalan kurang lebih 212 Ha.

c. Potensi Kependudukan

Berdasarkan data monografi Desa Tengger diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tengger adalah 1.939 jiwa terdiri dari 973 jiwa laki-laki dan 966 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Tengger 527 kepala keluarga (Monografi Desa, tahun 2001).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikannya

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman kanak-kanak	12 orang
2.	SD/ sederajat	1.274 orang
3.	SLTP/ sederajat	58 orang
4.	SLTA	16 orang
5.	D3	5 orang
6.	S1	4 orang

Sumber : Monografi Desa Tengger, tahun 2001

Dengan demikian tingkat pendidikannya tergolong masih rendah, karena bila dilihat dari jumlah penduduk sebagian besar tingkat pendidikannya sebatas SD atau sederajat.

Tabel 2. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Tengger

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	628 orang
2.	Buruh tani	418 orang
3.	Berwiraswasta	4 orang
4.	Pegawai negeri	17 orang
5.	Pedagang	28 orang
6.	Tukang	18 orang
7.	TNI/POLRI	2 orang
8.	Pensiun	10 orang

Sumber : Monografi Desa Tengger, tahun 2001

Dilihat dari jenis mata pencahariannya penduduk Desa Tengger mayoritas sebagai petani. Selain sebagai petani juga berprofesi sebagai buruh tani, pedagang dan pegawai negeri.

d. **Potensi Kelembagaan**

Kelembagaan pemerintahan Desa di Tengger memiliki jumlah aparat 10 orang, dengan jumlah RW ada 5 dan jumlah RT ada 14. Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tengger yaitu organisasi perempuan dengan jumlah anggota 350 orang, organisasi pemuda dengan jumlah anggota 210 orang dan LKMD dengan jumlah anggota 12 orang.

Kelembagaan ekonomi yang ada di Desa Tengger yaitu 1 buah koperasi, 24 warung kelontong, dan 1 buah lumbung desa. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Tengger yaitu 3 buah SD dengan jumlah guru 14 dan jumlah murid 274. Dan jumlah anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebesar 80 orang.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Penggambaran responden yang menjadi obyek dalam penelitian ini dilihat dari umur, pendidikan, mata pencaharian, dan kepemilikan lahan dan pendapatan sebelum serta sesudah mengikuti PHBM.

a. **Umur Responden**

Responden dalam penelitian ini yaitu penduduk desa hutan di Resort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang rata-rata umurnya di atas 20 tahun. dan umur maksimalnya adalah 58 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. Distribusi Umur Responden Penelitian

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1.	20 – 30 tahun	12	15,00%
2.	31 – 40 tahun	36	45,00%
3.	41 – 50 tahun	22	27,50%
4.	51 – 60 tahun	10	12,50%
Jumlah		80	100,00%

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki usia 31 – 40 tahun yaitu sebanyak (45%), dan usia 41 – 50 sebanyak (27,50%) sedangkan sisanya yaitu usia 20 – 30 tahun sebanyak (15%) dan usia 51 – 60 tahun sebanyak (12,50%).

b. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini kebanyakan adalah tamatan Sekolah Dasar. Distribusi tingkat pendidikan responden dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden Penelitian

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak Tamat SD	15	18,75%
2.	SD	39	48,75%
3.	SLTP	16	20,00%
4.	SLTA	10	12,50%
Jml		80	100,00%

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu penduduk desa hutan di Resort Polisi Hutan (RPH)

Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu (48,75%), tamat SD (18,75%), tidak tamatan SD dan (20%) tamatan SLTP dan sisanya yaitu (12,50%) tamatan SLTA.

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian sebagian besar responden berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai petani. Lebih jelasnya berikut ini akan disajikan mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sambilan responden penelitian yaitu penduduk desa hutan di Resort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang.

Tabel 5. Mata Pencaharian Pokok Responden

No.	Mata Pencaharian Pokok	Jumlah Responden	Persentase
1.	Petani	68	85,00
2.	Buruh tani	12	15,00
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa responden penelitian ini yaitu penduduk desa hutan di Resort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani dan hanya sebagian kecil saja yang menjadi buruh tani.

Tabel 6. Mata Pencaharian Sambilan Responden

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Responden	Persentase
1.	Petani	19	23,75
2.	Buruh tani	33	41,25
3.	Pedagang	13	16,25
4.	Tukang	12	15,00
	Tidak punya sambilan	3	3,75
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 6 terlihat bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini yaitu 32 orang atau (41,25%) buruh tani (23,75%), petani (16,25%), pedagang (15%), tukang dan (3,37%) tidak memiliki pekerjaan sambilan.

d. Kepemilikan Lahan Responden

Kepemilikan lahan dari responden dalam penelitian ini akan ditinjau menurut luas lahan, status kepemilikan lahan, lama menggarap lahan dan alasan bersedia menggarap lahan tersebut.

Tabel 7. Luas Lahan Sawah yang Dimiliki Responden

No.	Luas Lahan Sawah	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Kurang dari 0,25 Ha	40	50,00
2.	0,25 – 0,44 Ha	27	33,75
3.	0,45 – 0,64 Ha	1	1,25
4.	0,65 – 0,84 Ha	5	6,15
5.	0,85 – 1,04 Ha	7	8,25
Jumlah		80	100

Sumber: Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki lahan persawahan yang sempit yaitu antara kurang dari 0,25 Ha (50%) yang memiliki lahan antara 0,25 Ha – 0,44 Ha (33,75%), antara 0,85 – 0,104 Ha (8,25%), antara 0,65 – 0,84 Ha (6,15%), dan antara 0,45 Ha – 0,64 Ha (1,25%).

Tabel 8. Luas Lahan Tegalan yang Dimiliki Responden

No.	Luas Lahan Tegalan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Kurang dari 0,25 Ha	44	55,00
2.	0,25 – 0,44 Ha	24	30,00
3.	0,45 – 0,64 Ha	7	8,75
4.	0,65 – 0,84 Ha	0	0,00
5.	0,85 – 1,04 Ha	5	6,25
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan data hasil penelitian pada Tabel 8 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (55%) memiliki luas lahan tegalan yang sempit yaitu antara 0,25 Ha – 0,44 Ha, selebihnya yaitu (30%), memiliki lahan 0,45 Ha - 0,64 Ha (8,75%), memiliki lahan 0,85 Ha – 1,04 Ha dan (6,25%), memiliki lahan tegalan kurang dari 0,25 Ha.

Tabel 9. Status Lahan Sawah yang Dimiliki Responden

No.	Status Lahan Sawah	Jumlah Responden	Persentase
1.	Milik sendiri	65	81,25
2.	Milik perhutani	4	5,00
3.	Milik desa	5	6,25
4.	Menyewa/kontrak	4	5,00
5.	Tidak punya	2	2,50
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 9 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (81,25%) memiliki lahan sawah sendiri, sedangkan selebihnya yaitu (5%) responden menggarap lahan sawah milik perhutani (6,25%) menggarap lahan sawah milik desa (5%) menggarap lahan sawah sewaan atau kontrak dan hanya (2,50%) responden yang tidak memiliki lahan sawah.

Tabel 10. Status Tegalan yang Dimiliki Responden

No.	Status Lahan Tegalan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Milik sendiri	54	67,50
2.	Milik perhutani	22	27,50
3.	Milik desa	1	1,25
4.	Menyewa/kontrak	2	2,50
5.	Tidak Punya	1	1,25
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 10 terlihat bahwa sebagian besar responden (67,50%) menggarap lahan tegalan milik sendiri, selebihnya yaitu (27,50%) lahan tegalan milik perhutani, (1,25%) lahan tegalan milik desa, (2,50%) sawah sewaan atau kontrak dan (1,25%) tidak ada responden yang tidak memiliki lahan tegalan.

Tabel 11. Lama Menggarap Lahan Garapan dari Program PHBM

No.	Mata Pencapaian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	3 tahun	6	7,50
2.	2 tahun	48	60,00
3.	1 tahun	22	27,50
4.	0,5 tahun	4	5,00
Jumlah			

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 11 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (60%) telah menggarap lahan dari program PHBM cukup lama yaitu 2 tahun, selebihnya yaitu (27,50%) telah menggarap lahan dari program PHBM selama 1 tahun, (7,50%) telah menggarap lahan dari program PHBM selama 3 tahun dan (5%) baru menggarap lahan PHBM selama setengah tahun.

Tabel 12. Alasan Bersedia Menggarap Lahan dari Program PHBM

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Responden	Persentase
1.	Tidak memiliki lahan garapan	12	15,00
2.	Sebagai mata pencaharian pokok	14	17,50
3.	Sebagai mata pencaharian sambilan	21	26,25
4.	Untuk menambah pendapatan	31	68,75
5.	Untuk mengisi waktu luang	2	2,50
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 12 terlihat bahwa sebagian besar responden (68,75%) bersedia untuk menggarap lahan dari program PHBM dengan alasan untuk menambah pendapatan keluarga, selebihnya yaitu (26,25%) dengan alasan sebagai mata pencaharian sambilan, (17,50%) beralasan sebagai mata pencaharian pokok, (15%) beralasan karena tidak memiliki lahan garapan dan hanya (2,50%) yang beralasan untuk mengisi waktu luang.

Dengan demikian menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Desa Tengger yang mengikuti program PHBM tersebut memiliki lahan sawah maupun tegalan yang sempit dan bahkan ada sebagian pula

yang sama sekali tidak memiliki lahan. Keikutsertaan mereka dalam program PHBM relatif belum lama yaitu antara 1 sampai dengan 2 tahun. Diharapkan dengan keikutsertaan mereka dalam program PHBM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

e. Pendapatan Responden

Pendapatan yang diuraikan dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih responden yaitu penduduk desa hutan di Resort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang sebelum mengikuti program PHBM dan setelah mengikuti program PHBM.

Pendapatan bersih petani di Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sebelum mengikuti program PHBM yang berasal dari usaha bertani maupun buruh tani dapat disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 13. Pendapatan Bersih Petani Sebelum Mengikuti Program PHBM

No.	Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Rp. 7.000 – Rp. 10.000	45	56,25
2.	Rp. 11.000 – Rp. 14.000	29	36,25
3.	Rp. 15.000 – Rp. 18.000	2	2,50
4.	Lebih dari Rp. 18.000	4	5,00
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa sebagian besar responden (56,25%) memiliki pendapatan pokok yang rendah sebelum

mengikuti program PHBM yaitu antara Rp. 7.000,00 - Rp. 10.000,00 (36,25%) memiliki pendapatan pokok Rp. 11.000,00 – Rp. 14.000,00 (2,50%) memiliki pendapatan pokok Rp. 15.000,00 – Rp. 18.000,00 dan hanya (5%) yang memiliki pendapatan di atas Rp. 18.000,00.

Program PHBM diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani di sekitar hutan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setelah mengikuti program PHBM, maka pendapatan petani menjadi meningkat seperti terangkum pada tabel berikut :

Tabel 14. Pendapatan Bersih Petani Setelah Mengikuti Program PHBM

No.	Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Kurang Dari Rp. 10.000	22	27,50
2.	Rp. 10.000 – Rp. 15.000	46	57,50
3.	Rp. 16.000 – Rp. 20.000	8	10,00
4.	Rp. 21.000 – Rp. 25.000	1	1,25
5.	Lebih dari Rp. 25.000	3	3,75
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 14 terlihat bahwa setelah mengikuti program PHBM, maka pendapatan bersih sebagian besar responden (57,5%) meningkat menjadi Rp.10.000,00 – Rp. 15.000,00 selebihnya yaitu (27,50%) memiliki pendapatan kurang dari Rp.10.000,00 (10%) memiliki pendapatan Rp.16.000,00 – Rp. 20.000,00 (1,25%) memiliki pendapatan Rp.21.000,00 – Rp. 25.000,00 dan (3,75%) memiliki pendapatan lebih dari Rp. 25.000,00.

Dari hasil penelitian Tabel 14 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebelum mengikuti program PHBM memiliki pendapat bersih yang relatif rendah yaitu kurang dari Rp. 10.000,00 per hari. Setelah mengikuti program PHBM ternyata terdapat peningkatan pendapatan yang cukup berarti yaitu menjadi kurang lebih Rp. 10.000,00 sampai dengan Rp. 15.000,00 per hari kegiatan.

3. Pelaksanaan Program PHBM

a. Pengenalan Program PHBM (Lihat gambar 1, halaman 81).

Program PHBM mulai dikenal kepada responden dalam penelitian ini yaitu penduduk desa hutan di Resort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang seperti terangkum pada tabel berikut :

Tabel 15. Pengenalan Program PHBM

No.	Waktu	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Tahun 2001	71	88,75
2.	Tahun 2002	5	6,25
3.	Tahun 2003	2	2,50
4.	Tahun 2004	2	2,50
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan hasil Tabel 15 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa hutan di Resort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang

yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu (88,75%) mengenal program PHBM sejak tahun 2001, (6,25%) mengenal program PHBM sejak tahun 2002, (2,50%) mengenal program PHBM sejak tahun 2003 dan hanya (2,50%) responden yang baru mengenal program PHBM pada tahun 2004 ini.

Agar program PHBM tersebut dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang direncanakan, maka pihak perhutani selalu melakukan sosialisasi program PHBM kepada para masyarakat di sekitar hutan yaitu penduduk desa hutan di Resort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang. Berdasarkan pernyataan responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sejak mulai diperkenalkan, ternyata pihak Perhutani telah melakukan pengenalan program tersebut dengan frekuensi sebagai berikut :

Tabel 16. Pengenalan Program PHBM oleh Perhutani

No.	Intensitas	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	20 kali	3	3,75
2.	15 kali	6	7,50
3.	10 kali	30	37,50
4.	5 kali	29	36,25
5.	< 5 kali	12	15,00
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan hasil Tabel 16 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (37,50%) pernah mengikuti pengenalan program

PHBM sebanyak 10 kali dan (36,25%) pernah mengikuti pengenalan program PHBM sebanyak 5 kali, sedangkan selebihnya yaitu (15%) baru mengikuti sebanyak kurang dari 5 kali, (7,50%) pernah mengikuti sebanyak 15 kali dan (3,75%) pernah mengikuti sebanyak 20 kali.

Lokasi pelaksanaan pengenalan program PHBM menurut jawaban responden dalam penelitian ini dapat disajikan seperti terangkum pada tabel berikut :

Tabel 17. Lokasi Pengenalan Program PHBM oleh Perhutani

No.	Lokasi	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Di sekitar hutan (gubuk kerja)	7	8,75
2.	Di balai desa	30	37,50
3.	Di RT/RW setempat	17	21,25
4.	Di Kantor perhutani	21	26,25
5.	Di rumah warga	5	6,25
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 17 terlihat bahwa sebagian besar responden mengikuti program pengenalan PHBM di balai desa yaitu sebanyak (37,5%) responden, (26,25%) menyatakan sering mengikuti pengenalan program PHBM di kantor perhutani, (21,25%) menyatakan mengikuti pengenalan program PHBM di RT/RW setempat dan hanya (6,25%) yang mengikuti pengenalan program PHBM di rumah warga.

b. Penanaman (Lihat gambar 2, 3, dan 4 halaman 81).

Pada bagian penanaman ini akan diuraikan mengenai persiapan-persiapan yang dilakukan dalam penanaman tanaman

PHBM, pola tanam yang diterapkan dan luas lahan yang akan ditanami oleh setiap penggarap.

Tabel 18. Persiapan Lapangan pada Penanaman Tanaman PHBM

No.	Waktu	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Pembabatan semak, pengolahan tanah, persiapan bibit dan pupuk	71	88,75
2.	Pembabatan Semak	5	6,25
3.	Persiapan bibit tanaman	2	2,50
4.	Persiapan pupuk	2	2,50
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini yaitu (88,75%) melakukan persiapan pembabatan semak, pengolahan tanah, persiapan bibit tanaman dan persiapan pupuk, (6,25%) melakukan persiapan pembabatan semak, (2,5%) responden melakukan persiapan pengolahan lahan dan hanya (2,5%) responden melakukan persiapan pupuk.

Pola tanaman yang di terapkan oleh petani dalam program PHBM dapat diperlihatkan sebagai berikut :

Tabel 19. Pola Tanaman dalam Program PHBM

No.	Pola Tanaman	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Tanaman pokok kehutanan	57	71,25
2.	Tanaman tumpang sari	8	10,00
3.	Tanaman pengisi	3	3,75
4.	Tanaman sisipan	12	15,00
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 19 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (71,25%) melakukan pola tanaman pokok kehutanan yaitu jati dan mahoni, (10%) melakukan pola tanaman tumpangsari berupa padi gogo, (3,75%) melakukan pola tanaman pengisi berupa kesambi dan (15%) melakukan pola tanaman sisipan buah-buahan.

Luas area PHBM yang ditanami setiap penggarap menurut jawaban responden dalam penelitian ini dapat disajikan seperti terangkum pada tabel berikut :

Tabel 20. Luas Area PHBM yang Ditanami Penggarap

No.	Lokasi	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	0,25 Ha	54	67,5
2.	0,25 – 0,30 Ha	12	15,0
3.	0,31 – 0,35 Ha	3	3,75
4.	> 0,45 Ha	11	13,75
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan hasil penelitian Tabel 20 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (67,50%) menanam area pada program PHBM seluas 0,25 Ha, selebihnya yaitu (15%) menanam area seluas 0,25 – 0,30 Ha, (3,75%) menanam area 0,31 – 0,25 Ha dan (13,75%) menanam area seluas lebih dari 0,45 Ha.

- c. Pemeliharaan dan Pengamanan (Lihat gambar 5, 6, dan 7 halaman 81 dan 82).

Berdasarkan pernyataan responden, kegiatan penyulaman tanaman yang mati mereka lakukan seperti dilakukan pada tabel berikut :

Tabel 21. Kegiatan Penyulaman Tanaman yang Mati

No.	Kegiatan Penyulaman	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Setiap ada tanaman yang mati	42	52,50
2.	Setelah habis hujan	33	41,25
3.	Setiap satu minggu sekali	4	5,00
4.	Setiap hari	1	1,25
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 21 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (52,50%) melakukan penyulaman setiap tanaman yang mati, (41,25%) melakukan penyulaman setiap habis hujan, selebihnya yaitu (5%) melakukan penyulaman setiap minggu dan hanya (1,25%) yang masih melakukan penyulaman setiap hari.

Berdasarkan pernyataan responden, mereka melakukan penyulaman tanaman pada area PHMB dengan cara seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 22. Cara Penyulaman Tanaman

No.	Cara Penyulaman	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Tanaman yang mati diganti tanaman baru	48	60,00
2.	Tanaman digali dan ditanami yang baru	9	11,25
3.	Pengontrolan tanaman yang mati	1	22,50
4.	Persiapan bibit baru	4	1,25
5.	Tanah dibuat lubang	4	5,00
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 22 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (60%) melakukan penyulaman dengan cara membuang tanaman yang sudah mati dan diganti dengan tanaman yang baru, (22,50%) melakukan pengontrolan terhadap tanaman yang mati, (11,25%) menggali tanaman yang mati dan menyulaminya dengan tanaman baru, (5%) membuat lubang untuk tanaman baru, dan (1,25%) menyiapkan bibit tanaman.

Berdasarkan pernyataan responden, mereka memperoleh pupuk untuk tanaman PHBM seperti dilakukan pada tabel berikut :

Tabel 23. Perolehan Pupuk oleh Petani untuk Tanaman PHBM

No.	Perolehan Pupuk	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Perhutani	64	80,00
2.	KUD	7	8,75
3.	Swadaya sendiri	9	13,25
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 23 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (80%) memperoleh pupuk untuk tanaman pada program PHBM dari Perhutani, (8,75%) memperoleh dari koperasi dan (13,25%) pupuk dari swadaya sendiri.

Berdasarkan pernyataan responden, jenis pupuk yang diberikan untuk tanaman program PHBM adalah seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 24. Jenis Pupuk untuk Tanaman PHBM

No.	Jenis Pupuk	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Pupuk kandang	64	80,00
2.	Pupuk urea	11	13.75
3.	Pupuk bokashi	2	2.50
4.	Pupuk kompos	2	2.50
5.	Pupuk buatan	1	1.25
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 24 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (80%) menggunakan pupuk kandang untuk tanaman pada program PHBM, (13,75%) menggunakan pupuk urea, (2,50%) menggunakan pupuk kompos dan hanya (1,25%) yang menggunakan pupuk buatan.

Berdasarkan pernyataan responden, kegiatan pengamanan atau perlindungan hutan dilakukan seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 25. Pengamanan Hutan

No.	Pengamanan Hutan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Meronda	71	88.75
2.	Pengontrolan periodik	5	6.25
3.	Dibuat pagar	4	5,00
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan pada Tabel 25 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (88,75%) melakukan pengamanan atau perlindungan hutan dengan cara meronda, (6,25%) melakukan pengamanan dengan

cara melakukan pengontrolan secara periodik, dan (5%) melakukan pengamanan dengan cara membuat pagar berupa tanaman berduri.

Berdasarkan pernyataan responden, yang menyebabkan menurunnya pencurian kayu hutan setelah dilaksanakannya program PHBM disebabkan oleh hal-hal seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 26 Penyebab Menurunnya Pencurian di Hutan Setelah Adanya Program PHBM

No.	Penyebab	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Prastisipasi pengamanan oleh masyarakat	48	60,00
2.	Mayarakat ikut memiliki dan mengelola	9	11,25
3.	Kesadaran masyarakat mulai tumbuh	12	15,00
4.	Adanya penyuluhan arti pentingnya hutan.	11	13,75
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 26 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu menyatakan bahwa penurunan pencurian kayu hutan disebabkan oleh adanya program PHBM (60%), disebabkan oleh keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengamanan (11,25%), akibat keikutsertaan masyarakat memiliki dan mengelola hutan (15%), kesadaran masyarakat mulai tumbuh (13,75%), akibat adanya penyuluhan-penyuluhan tentang arti penting hutan dari Perhutani.

d. Pemanenan Hasil (Lihat gambar 10 halaman 82).

Berdasarkan pernyataan responden, mereka telah melakukan pemanenan tanaman tumpang sari seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 27. Pemanenan Tanaman Tumpang Sari

No.	Pemanenan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	7 – 8 kali	4	5,00
2.	5 - 6 kali	5	6,25
3.	3 – 4 kali	22	27,50
4.	1– 2 kali	44	55,00
5.	Belum pernah	5	6,25
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan pada Tabel 27 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (55%) sudah melakukan pemanenan tanaman tumpangsari pada lahan PHBM sebanyak 1-2 kali, (27,50%) sudah melakukan panen sebanyak 3-4 kali, (6,25%) melakukan panen 5-6 kali, (5%) melakukan panen 7-8 kali dan (6,25%) belum pernah melakukan pemanenan.

Berdasarkan pernyataan responden, besarnya hasil yang didapat dari setiap kali musim panen adalah seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 28. Besarnya Hasil Pemanenan Setiap Musim

No.	Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Rp. 100.000 – Rp. 250.000	44	55,00
2.	Rp. 251.000 – Rp. 400.000	28	35,00
3.	Rp. 401.000 – Rp. 550.000	3	3,75
4.	Rp. 551.000 – Rp. 700.000	3	3,75
5.	> Rp. 700.000	2	2,50
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 28 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (55%) memperoleh hasil panen setiap musimnya antara Rp. 100.000,00 – Rp. 250.000,00 (35 %) memperoleh Rp. 401.000,00 – Rp. 550.000,00 (3,75%) memperoleh Rp. 551.000,00 – Rp. 700.000,00 dan sisanya hanya (2,5%) yang memperoleh hasil panen lebih dari Rp. 700.000,00 setiap kali masa panen.

Berdasarkan pernyataan responden, setiap kali Perhutani melakukan penebangan kayu hutan mereka melakukan partisipasi sebagai berikut :

Tabel 29. Partisipasi pada Saat Perhutani Melakukan Penebangan di Hutan

No.	Partisipasi	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Ya	60	75,00
2.	Tidak	20	25,00
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, Tahun 2004

Berdasarkan hasil Tabel 29 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (75%) ikut berpartisipasi saat Perhutani melakukan penebangan kayu hutan dan (25%) sisanya tidak ikut berpartisipasi.

Berdasarkan pernyataan responden, pendapatan mereka setiap kegiatan selama masa penebangan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 30. Pendapatan Saat Masa Penebangan

No.	Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Rp. 7.100-Rp. 9.000	24	30,00
2.	Rp. 9.100-Rp. 11.000	17	21,25
3.	Rp. 11.100-Rp. 13.000	5	6,25
4.	Rp. 13.100-Rp. 15.000	12	15,00
5.	> Rp. 15000	22	27,50
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan hasil Tabel 30 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (30%) memiliki pendapatan Rp. 7.100,00-Rp.9.000,00 (27%) memiliki pendapatan lebih dari Rp.15.000,00 (21,25%) memiliki pendapatan Rp.9.100,00-Rp.11.000,00 (15%) memiliki pendapatan Rp.13.100,00-Rp.15.000,00 dan (6,25%) memiliki pendapatan Rp. 11.100,00-Rp. 13.000,00.

Sistem pemberian upah dari penebangan hasil hutan kepada peserta program PHBM dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 31. Sistem Pemberian Upah

No.	Pemberian Upah	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Setelah dilakukan bagi hasil	30	37,50
2.	Setelah panen	16	20,00
3.	Sehari sekali	2	2,50
4.	Setiap bulan sekali	13	16,25
5.	Setiap minggu sekali	19	23,75
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan hasil Tabel 31 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (37,50%) menerima upah dari partisipasinya mengikuti program penebangan kayu hutan setelah dilakukan bagi hasil, (23,75%) menerima upah setiap seminggu sekali, (20%) menerima hasil setelah panen, (16,25%) dan (2,50%) menerima upah setiap hari.

- e. Pengembangan Hutan Rakyat (Lihat gambar 11 dan 12, halaman 82).

Pengembangan hutan rakyat dilakukan seperti disajikan sebagai berikut :

Tabel 32. Area Pengembangan Hutan Rakyat

No.	Status Tanah	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Tanah milik perorangan yang dibiayai Perhutani	67	83,75
2.	Tanah milik Perhutani	6	7,50
3.	Tanah pemerintah	1	1,25
4.	Tanah desa	6	7,50
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan hasil Tabel 32 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (83,75%) menanami area pengembangan hutan rakyat pada lahan milik sendiri yang dibiayai Perhutani, (7,50%) yang menanami tanah milik Perhutani, (1,25%) menanami tanah milik pemerintah, dan (7,50%) menanami tanah milik desa.

Cara pengembangan hutan rakyat dilakukan oleh Perhutani dengan cara sebagai berikut:

Tabel 33. Cara Pengembangan Hutan Rakyat

No.	Cara Pengembangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Perhutani memberi modal bagi masyarakat yang mempunyai lahan	64	80,00
2.	Memberikan penyuluhan-penyuluhan	10	12,50
3.	Lewat informasi dari aparat Perhutani	2	2,50
4.	Memberikan informasi kepada masyarakat	4	5,00
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan hasil Tabel 33 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (80%) menyatakan bahwa sistem pengembangan hutan rakyat dilakukan dengan cara Perhutani memberikan modal pada petani yang mempunyai lahan, (12,50%) menyatakan bahwa Perhutani hanya memberikan penyuluhan-penyuluhan, (5%) menyatakan Perhutani memberikan informasi kepada masyarakat, dan (2,50%) menyatakan lewat informasi dari aparat Perhutani.

Berdasarkan pernyataan responden tentang pendapatan yang diperolehnya dari mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 34. Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari

No.	Pernyataan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sudah mencukupi	42	52.50
2.	Belum mencukupi	38	47.50
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 34 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (52,50%) telah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari pendapatan pokok dan sampingannya, dan (47,50%) belum mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilannya tersebut.

Sikap responden tentang diadakannya perkumpulan koperasi dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 35. Sikap Responden dengan Didirikannya Koperasi

No.	Sikap	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Setuju	76	95.00
2.	Tidak setuju	2	2.50
3.	Tidak tahu	2	2.50
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 35 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (95%) setuju dengan didirikannya koperasi dan hanya ada (2,50%) yang tidak setuju dan (2,50%) yang tidak tahu.

Untuk pengembangan koperasi, maka diperlukan modal untuk menjalankan usaha-usahanya. Perolehan modal koperasi menurut pernyataan responden dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 36. Permodalan Koperasi

No.	Permodalan Koperasi	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	PUKK (Perkreditan Usaha Kecil dan Koperasi)	58	72,50
2.	Hasil Program PHBM	8	10,00
3.	Perhutani	11	13,75
4.	Swadaya masyarakat	1	1,25
5.	Bantuan pemerintah	2	2,50
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 36 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden (72,50%) menyatakan bahwa perolehan permodalan koperasi dari PUKK (Perkreditan Usaha Kecil dan Koperasi), (13,75%) menyatakan dari Perhutani, (10%) menyatakan dari hasil program PHBM, (1,25%) menyatakan dari swadaya masyarakat dan (2,50%) menyatakan dari pemerintah.

Syarat-syarat menjadi anggota koperasi menurut pendapat responden dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 37. Syarat Menjadi Anggota Koperasi

No.	Keanggotaan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Yang mengikuti program PHBM otomatis menjadi anggota koperasi	40	50,00
2.	Anggota LMDH	16	20,00
3.	Penduduk desa setempat	16	20,00
4.	Syarat lain	8	10,00
Jumlah		80	100

Sumber : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 37 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (50%) menyatakan yang menjadi anggota koperasi adalah warga yang mengikuti program PHBM, (20%) menyatakan anggota merupakan anggota LMDM, (20%) menyatakan penduduk setempat dan (10%) menyatakan ada syarat-syarat lain.

Pemenuhan oleh koperasi terhadap kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan pernyataan responden dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 38. Pemenuhan Kebutuhan Petani Melalui Koperasi

No.	Pemenuhan Koperasi	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Ya, Karena menyediakan kebutuhan para petani	47	58,75
2.	Ya, karena menyediakan pupuk dan obat-obatan	37	40,00
3.	Tidak karena, tidak menyediakan kebutuhan petani	1	1,25
Jumlah		80	100

Sumber Data : Data Primer, tahun 2004

Berdasarkan Tabel 38 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu (58,75%) menyatakan ya, karena koperasi menyediakan kebutuhan petani, (40%) menyatakan ya, karena koperasi menyediakan pupuk dan obat-obatan, dan (1,25%) menyatakan tidak, karena koperasi tidak menyediakan kebutuhan petani.

4. Sumbangan PHBM terhadap Pendapatan Penduduk Desa Tengger

Hasil penelitian pada Tabel 13 menunjukkan bahwa tingkat pendapatan sebagian besar penduduk Desa Tengger sebelum mengikuti program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah kurang dari Rp. 10.000,00 dengan adanya program PHBM, pendapatan bersih sebagian besar responden meningkat menjadi Rp. 10.000,00 – 15.000,00 perhari kegiatan dengan demikian adanya program PHBM tersebut dapat meningkatkan pendapatan penduduk.

5. Sumbangan PHBM terhadap Penurunan Kerusakan Hutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2000, tingkat pencurian kayu di wilayah Resort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang mencapai 573 pohon selama satu tahun. Setelah diselenggarakannya program PHBM pada tahun 2001, tingkat kerusakan hutan akibat pencurian menurun menjadi 354 pohon dan tingkat pencurian kayu di hutan pada tahun 2002 juga menurun menjadi 181 pohon. Pada tahun 2003, tingkat pencurian di hutan RPH Tengger sebenarnya sudah menurun, akan tetapi tingkat

pencurian di hutan oleh oknum-oknum dari luar Desa Tengger yang tidak bertanggungjawab sehingga terjadi penjarahan hutan mengakibatkan kerusakan hutan meningkat menjadi 854 pohon. Pada tahun 2004 tingkat pencurian di hutan menurun menjadi 363 pohon.

Tabel 39. Tingkat Pencurian Kayu di Lahan PHBM

No	Tahun	Kehilangan		Keterangan
		Pohon	Kerugian	
1	2000	573	Rp 95.538.631	Pencurian penjarahan
2	2001	354	Rp 59.188.321	Pencurian biasa
3	2002	181	Rp 36.512.023	Pencurian biasa
4	2003	854	Rp 88.726.159	Pencurian penjarahan
5	2004	363	Rp 74.128.000	Pencurian biasa
JUMLAH		7322	Rp354.093.134	

Sumber: Data Keamanan RPH Tengger BKPH Tuder, tahun 2004

B. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini tentang Sumbangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat terhadap Pendapatan Penduduk Desa Hutan di Resort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo, Kabupaten Rembang akan dituangkan dalam dua bagian yaitu pengelolaan sumber daya hutan dan pendapatan masyarakat.

1. Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat terhadap Pendapatan Penduduk Desa Hutan di Resort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sekitar hutan yang rendah yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan mereka. Sebagai warga sekitar hutan dengan mata pencaharian sebagai petani, keberadaan kepemilikan lahan tegalan maupun lahan persawahan merupakan modal utama, akan tetapi dilihat dari kepemilikan tanah dari mereka relatif sempit dan bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan tegalan maupun lahan persawahan. Sehingga bagi mereka yang tidak memiliki lahan hanya berprofesi sebagai buruh tani.

Adanya program PHBM yang diselenggarakan oleh pihak Perhutani, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat dengan harapan setelah mengikuti program PHBM dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Program PHBM mulai dikenalkan oleh Perhutani kepada masyarakat Desa Tengger Kabupaten Rembang sejak tahun 2001 (hasil penelitian pada Tabel 15). Kegiatan-kegiatan pengenalan program pihak Perhutani kepada masyarakat hingga saat ini kurang lebih dilakukan 5 sampai 10 kali. Dalam rangka keperluan pengenalan program PHBM, pihak Perhutani sering menggunakan balai desa sebagai tempatnya dengan tujuan agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian menunjukkan bahwa program PHBM di RPH Tengger KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 tahun.

Persiapan lapangan yang dilakukan dalam program PHBM adalah dengan cara pemababatan semak, pengolahan tanah, persiapan bibit, dan yang terakhir adalah pemupukan pada masa pemeliharaan. Jenis tanaman

yang ditanam oleh penduduk yang mengikuti program PHBM tersebut adalah tanaman kehutanan diantaranya yaitu pohon jati dan mahoni. Sistem pembagian area pada program PHBM dilakukan secara merata kepada masyarakat dengan luas area untuk masing-masing anggota LMDH kurang lebih 0,25 Ha.

Pada masa pemeliharaan tanaman hal-hal yang perlu dilakukan oleh para petani adalah penyulaman terhadap setiap tanaman yang mati lalu diganti dengan tanaman baru yang sering dilakukan setelah habis hujan untuk menjamin tanaman tetap hidup. Kegiatan pemeliharaan selain dengan menanam kembali tanaman-tanaman yang mati, juga dilakukan kegiatan pemupukan agar tanaman dapat tumbuh subur. Jenis pupuk yang sering digunakan oleh para petani untuk tanaman kehutanan maupun tanaman tumpang sari pada area program PHBM adalah pupuk kandang yang di dapatkan dari pihak Perhutani. Selain memelihara tanaman pada area program PHBM, para petani juga ikut berpartisipasi untuk menjaga keamanan hutan dari para pencuri kayu yang dilakukan dengan cara meronda maupun melakukan pengontrolan secara periodik.

Sampai saat ini para petani yang telah mengikuti program PHBM telah merasakan hasil kurang lebih 1 – 2 kali dengan hasil panen setiap musim antara Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.250.000,00 Selain mengusahakan penggarapan pada lahan Perhutani dalam program PHBM, para penduduk sekitar hutan tersebut juga ikut berpartisipasi dengan pihak Perhutani pada saat penebangan hutan dengan hasil yang diperoleh setiap

harinya kurang lebih Rp. 7.000,00 sampai dengan Rp. 11.000,00 setiap harinya dan ada pula yang memperoleh hasil lebih dari Rp.15.000,00 tergantung jenis pekerjaan yang dilakukannya. Sistem pemberian upah saat mengikuti kegiatan penebangan hutan dengan pihak Perhutani sering kali dilakukan setelah bagi hasil dan ada pula yang menerima upah setiap satu minggu sekali, tergantung perjanjian yang dilakukan dengan pihak Perhutani.

Selain melakukan penanaman pada area Perhutani, pihak Perhutani juga melakukan program pengembangan hutan rakyat yaitu dengan menanam lahan milik masyarakat yang seluruh dibiayai oleh Perhutani. Dengan mengikuti program PHBM hasil kerjasama masyarakat sekitar hutan dengan pihak Perhutani dapat meningkatkan pendapatan penduduk sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-harinya, namun demikian ada pula sebagian dari mereka yang masih belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari tersebut.

Usaha lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tengger adalah dengan didirikannya Koperasi Unit Desa (KUD) yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan hidup sehari-hari juga memenuhi kebutuhan pupuk dan obat-obatan. Upaya perolehan modal oleh koperasi agar dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, maka pihak koperasi menjalin kerjasama dengan PUKK (Perkreditan Usaha Kecil dan Koperasi) dalam hal permodalan.

2. Sumbangan PHBM terhadap Pendapatan Penduduk

Dengan adanya program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), ternyata mampu meningkatkan pendapatan bersih petani. Besarnya peningkatan pendapatan bersih yang diperoleh petani dari keikutsertaan dalam program PHBM tersebut kurang lebih Rp.5.000,00 perhari kegiatan. Pada awalnya sebelum mengikuti program PHBM, pendapatan bersih petani perhari kegiatan kurang dari Rp.10.000,00 sedangkan setelah mengikuti program PHBM pendapatan petani meningkat menjadi Rp. 10.000,00 sampai dengan Rp.15.000,00 perhari kegiatan dan bahkan ada yang lebih dari itu.

Selain dapat meningkatkan pendapatan bersih petani, ternyata dengan adanya program PHBM tersebut juga dapat menurunkan tingkat pencurian kayu hutan di sekitar Desa Tengger. Hal ini terbukti dari tingkat pencurian hutan pada tahun sebelum dilaksanakan program PHBM yaitu tahun 2000 kurang lebih 573 pohon menurun menjadi 254 pohon pada tahun 2001 dan 181 pohon pada tahun 2002 sedangkan pada tahun 2003 pencurian kayu yang sifatnya biasa oleh masyarakat sekitar hutan menurun akan tetapi ada kegiatan penjarahan oleh masyarakat lain desa hingga mengakibatkan kerusakan hutan 854 pohon. Pada tahun 2004 terjadi penurunan menjadi 363 pohon.

Walaupun tingkat sumbangan program PHBM terhadap peningkatan pendapatan petani tidak terlalu besar, akan tetapi setidaknya program ini masih dirasakan berarti oleh masyarakat untuk menambah kesejahteraan keluarga. Selain itu dengan program PHBM ini juga menguntungkan pihak Perhutani karena dapat mengurangi tingkat pencurian kayu di wilayah RPH Tengger.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Masyarakat (PHBM) yang dilakukan Perhutani bersama masyarakat sekitar hutan di Resort Polisi Hutan (KPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar hutan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan yang pada mulanya kurang dari Rp.10.000,00 menjadi kurang lebih Rp. 10.000,00 per hari sampai dengan Rp. 15.000,00 per hari kegiatan setelah mengikuti program PHBM.

Dengan adanya program PHBM, selain dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar hutan juga dapat menurunkan tingkat kerusakan hutan. Pada tahun 2000 sebelum diadakan sosialisasi program PHBM telah terjadi pencurian penjarahan sebanyak 573 pohon, dengan kerugian Rp 96.538.631, pada tahun 2001 telah dilakukan pengenalan program PHBM namun masih terjadi pencurian biasa tetapi telah mengalami penurunan sebanyak 354 pohon dengan kerugian Rp 59.188.321, pada tahun 2002 masih terjadi pencurian yang sifatnya biasa sebanyak 181 pohon dengan kerugian Rp 36.512.023, pada tahun 2003 mengalami peningkatan pencurian walaupun telah diadakan pengenalan program PHBM ini disebabkan oleh adanya pencurian penjarahan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Desa Tengger, tahun 2004 kehilangan 363 pohon dengan kerugian Rp 74.128.000.

B. Saran

Mengacu dari hasil penelitian tersebut dimana dengan adanya program PHBM dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar hutan dan menurunkan tingkat pencurian kayu di hutan, maka hendaknya pihak Perhutani selain memperluas area PHBM juga meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih baik agar pendapatan penduduk sekitar hutan meningkat.

Dengan demikian adanya program PHBM dapat meningkatkan pendapatan penduduk di sekitar hutan. Selain itu hendaknya masyarakat juga lebih meningkatkan partisipasinya dalam penjagaan keamanan hutan sehingga kelestarian hutan dapat terjaga dari pencurian oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsiah, Siti. 2004. "Faktor-faktor Geografi yang Berpengaruh terhadap Pengembangan Obyek Wisata Mata Air Panas Poring di Daerah Ranau Sabah Malaysia". *Skripsi*. Semarang: Jurusan Geografi FIS UNNES.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Yuli. 2000. "Partisipasi Pasangan Usia Subur dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Menuju norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara". *Skripsi*. Semarang: Jurusan PPKN FIS UNNES.
- Hanafi, S. 2004. Kawasan Hutan Dijungkirbalikan. Semarang : Perum Perhutani Unit I Jateng. *Ruas Edisi 07*. Halaman 41.
- Isrowikah. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di RPH Kwadungan BKPH Temanggung". (Studi Kasus di Purbasari). *Skripsi*. Semarang: Jurusan Geografi FIS UNNES.
- Kasryno, Faizal (Penyunting). 1984. *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 24 Tahun 2001. Tentang *Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat Di Propinsi Jawa Tengah*. Semarang.
- Mubyarto, 1973. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : LP3S.
- Muhtadi, D. 2002. "Kelola Hutan Bersama Masyarakat". dalam Kompas. 16 Maret 2002.
- Perhutani. 2001. *Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Besama Masyaraka*. Jakarta : Perum Perhutani.
- Saadah, Sri. 1990. *Masyarakat Petani, Mata Pencapaian Sambilan dan Kesempatan Kerja di Kelurahan Capung Timur*. Jakarta : Depdikbud.
- Sudiono, Jon. 1995." *Pengusahaan dan Pelestarian Hutan* " dalam Duta Rimba edisi 179-180/XX/Mei-Juni. Semarang : Perum Perhutani Unit I Jateng. Halaman 2.
- Tim Pustaka Setia. 2002. *GBHN 1999-2004*. Bandung: CV. Pustaka Setia.